



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015-2017





INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015-2017



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015-2017

ISBN: 978-602-5402-32-6

No. Publikasi: 19520.1808

Katalog BPS: 2302004.19

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25,0 cm

Jumlah Halaman : xiv + 71 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (BPS)

TIM PENYUSUN

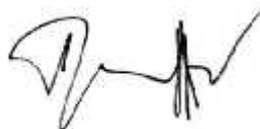
Penanggung Jawab	:	Darwis Sitorus, S.Si, M.Si
Editor	:	Harjo Teguh Ilmiana, S.Si, MM Drs. Agusman Simbolon, MAB Aja Nasrun, SST, M.Sc Desiana Arbani Safari, SST, MAP
Penulis	:	Sohidin, SST Femmy Ristia, SST Nur Jannah Mega Anindiata, SST
Gambar Kulit	:	Sohidin, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015–2017 ini menyajikan series Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market/KILM*) melalui data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) periode Agustus 2015-2017. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*) dengan harapan agar dapat menjadi acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO, hanya 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan kabupaten/kota serta tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan dalam publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi berikutnya.

Pangkalpinang, 31 Oktober 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	2
1.2 Sakernas dan KILM	4
1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	6
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM.....	9
BAB 2. PENJELASAN TEKNIS	13
2.1 Indikator Pasar Tenaga Kerja	16
BAB 3. PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA	27
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	27
KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	31
KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	35
KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha ...	39
KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja..	43
KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal.....	47



BAB 4. INDIKATOR PENGANGGURAN.....	51
KILM 8. Pengangguran.....	51
KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	53
KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
KILM 12. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>).....	63
KILM 13. Tingkat Ketidaktifan.....	65
BAB 5. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	69
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	69

<https://babel.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015-2017.....	36
Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015-2017	40
Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015-2017.....	51
Tabel 4. Indikator Penganggur Umur Muda, 2015-2017.....	57
Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2017.....	61
Tabel 6. Indikator Setengah Pengangguran (persen), 2015-2017 ...	64
Tabel 7. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2015-2017.....	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan.....	14
Gambar 2. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2015-2017.....	27
Gambar 3. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2015-2017.....	28
Gambar 4. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), 2015-2017.....	29
Gambar 5. TPAK Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015-2017.....	30
Gambar 6. <i>Employment to Population Ratio</i> (EPR), 2015-2017.....	31
Gambar 7. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2017.....	32
Gambar 8. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur Muda dan Dewasa, 2015-2017.....	33
Gambar 9. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur, 2015-2017.....	34
Gambar 10. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017.....	35
Gambar 11. Persentase Pekerja Rentan, 2015-2017.....	37
Gambar 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, 2017...	38
Gambar 13. Persentase Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota 2015-2017.....	38
Gambar 14. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2017.....	41
Gambar 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2015-2017.....	42
Gambar 16. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu, 2015-2017..	43
Gambar 17. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2015-2017.....	44
Gambar 18. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2017.....	45



Gambar 19.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, 2017	45
Gambar 20.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2017	47
Gambar 21.	Persentase Penduduk Pekerja Formal/Informal, 2015-2017	48
Gambar 22.	TPT Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015-2017	52
Gambar 23.	TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2015-2017	53
Gambar 24.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2017	54
Gambar 25.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Klasifikasi Daerah (persen), 2015-2017	55
Gambar 26.	<i>Share</i> Penganggur Umur Muda (persen), 2015-2017	58
Gambar 27	TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2017	59
Gambar 28.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2017	63
Gambar 29.	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017	67
Gambar 30.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015-2017	70

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator tersebut berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas bertujuan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan. Hadirnya data indikator ketenagakerjaan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan baik dan tepat sasaran untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia.

Sejak Triwulan I Februari 2011, BPS menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). Sementara itu, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menerbitkan publikasi yang sama sejak tahun data Agustus 2013. ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Sejak tahun 2011, KILM Indonesia merujuk pada edisi ke-6 yang diterbitkan ILO. Untuk edisi KILM Indonesia tahun 2017 ini, KILM yang digunakan sebagai rujukan adalah edisi ke-9 yang diterbitkan ILO pada tahun 2015.



1.1 SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari kegiatan-kegiatan tersebut, Sakernas merupakan survei khusus yang ditujukan untuk menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Selain itu, secara khusus pelaksanaan Sakernas juga bertujuan untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Dalam perjalanannya, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pelaksanaan pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, sedangkan pada tahun 1994 sampai dengan 2001 Sakernas dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus. Tahun 2002 sampai dengan 2004 selain dilaksanakan secara tahunan kegiatan Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas kemudian dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari



(Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Namun pada bulan November 2014 dikarenakan adanya berbagai alasan Sakernas tidak dapat dilaksanakan.

Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran (dua kali setahun yaitu Februari dan Agustus) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas pada Agustus sekitar 200.000 rumah tangga. Namun dikarenakan adanya permasalahan anggaran, maka pada Sakernas Agustus 2016 hanya dilakukan pada 50.000 sampel rumah tangga dan hanya menampilkan angka di level provinsi. Pada tahun 2017-2018, Sakernas dilaksanakan secara panel rumah tangga sehingga setiap rumah tangga terpilih akan dilakukan pencacahan sebanyak 4 kali.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel Sakernas.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu *Key Indicators of the Labour Market (KILM)*. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

a. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, keluarga berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

b. Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, Supas maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.



c. Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan Februari 2017 menggunakan penimbang langsung dari hasil updating dengan memperhitungkan strata lapangan pekerjaan dan menggunakan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035 sebagai kolaborasi akhir.

d. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim. Dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri atas pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

e. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

f. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- a. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja
- b. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO (*International Labour Organization*) bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, tata kelola organisasi yang baik, dan analisis informasi pasar tenaga kerja yang menyeluruh. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:



a. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

b. Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sakernas sebagai salah satu sumber

data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator DSGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas diantaranya:

- Proporsi wanita yang memegang jabatan manajerial.
- Proporsi pekerja informal di sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
- Pendapatan rata-rata per jam dari pekerja perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, kelompok usia dan penyandang disabilitas.
- Tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan penyandang disabilitas.
- Proporsi penduduk muda (15-24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).
- Persentase jumlah anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut kelompok jenis kelamin dan umur.
- Jumlah pekerja pada industri pariwisata dan proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin.
- Pekerja sektor manufaktur sebagai proporsi dari total pekerja.

c. Memantau Kesenjangan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

d. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu



cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial.

Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk usia kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja-KILM 1) dan yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja-KILM 13), bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur-KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang

menghadapi situasi ini semestinya berusaha menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, di antaranya latar belakang sosial ekonomi dan pengalaman kerja yang juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan (KILM 20).

Selain itu untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, dimana jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), kemudian bandingkan dengan total penduduk yang bekerja (lihat KILM 2). Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika lowongan untuk pekerjaan bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di sektor formal dibuka, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah jumlah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat



dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<https://babel.bps.go.id>



BAB 2

PENJELASAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah konsep dasar angkatan kerja (*standard labor force concept*), seperti pada diagram di bawah.

Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan



Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.



Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short time work*), pekerja bebas dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu

jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, dimana penganggur adalah situasi dari tidak adanya pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi tidak adanya pekerjaan secara total.

2.1 INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 kelompok, yaitu:

- a. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
- b. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (penduduk yang bekerja menurut jam kerja), dan KILM 7 (penduduk yang bekerja di sektor informal);
- c. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur) dan tingkat ketidakaktifan yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok umur muda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran dan pendidikan), KILM 12



- (setengah penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
- d. Indikator pendidikan dan melek huruf yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
 - e. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan), dan KILM 17 (upah per jam);
 - f. Produktivitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 18 (produktivitas tenaga kerja);
 - g. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja);
 - h. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk

produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi.

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pengelompokan menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:



- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari:
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utamanya yaitu berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3), informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu:

1. A (*Agriculture*)/Sektor Pertanian,
2. M (*Manufacture*)/Sektor Manufaktur
3. S (*Services*)/Sektor Jasa-jasa,

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Indikator pekerja paruh waktu fokus pada pekerja individu yang memiliki jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh waktu (*full time*), Pekerja paruh waktu merupakan jumlah pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 Jam seminggu dibagi dengan total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Batasan 35 jam dalam seminggu didasarkan atas standar internasional yang sudah disepakati oleh ILO.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang bekerja menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang pada periode waktu tertentu yang bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional,



sehingga informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan.

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran merupakan suatu kondisi yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. TPT tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering memang ada namun cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga

kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Pada indikator ini, yang dimaksud dengan istilah "umur muda" mencakup seseorang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "umur dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur, sehingga dalam publikasi ini, Indikator tersebut tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.



KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah).

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan

bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan $1 - \text{TPAK}$ ($1 - \text{TPAK}$).

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi KILM.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah.



Oleh karena itu, indikator terkait besaran upah juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu

persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB) dan merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis KILM 20. Indikator ini juga tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.



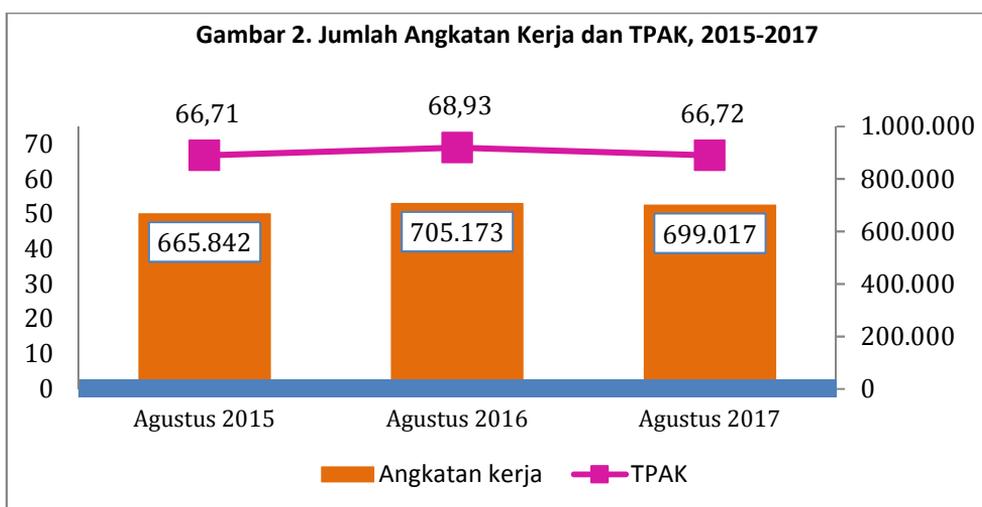
BAB 3

PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 mencapai sekitar 699 ribu orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 6 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 (705 ribu orang) dan naik sebanyak 33 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2015 (665 ribu orang). Penurunan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus 2016-2017 seiring dengan turunnya TPAK yaitu dari 68,93 persen pada Agustus 2016 menjadi 66,72 persen pada Agustus 2017. Jika dibandingkan antara tahun 2015 dan 2017, peningkatan angkatan kerja diiringi peningkatan TPAK dari 66,71 persen pada Agustus 2015 menjadi 66,72 persen pada Agustus 2017.

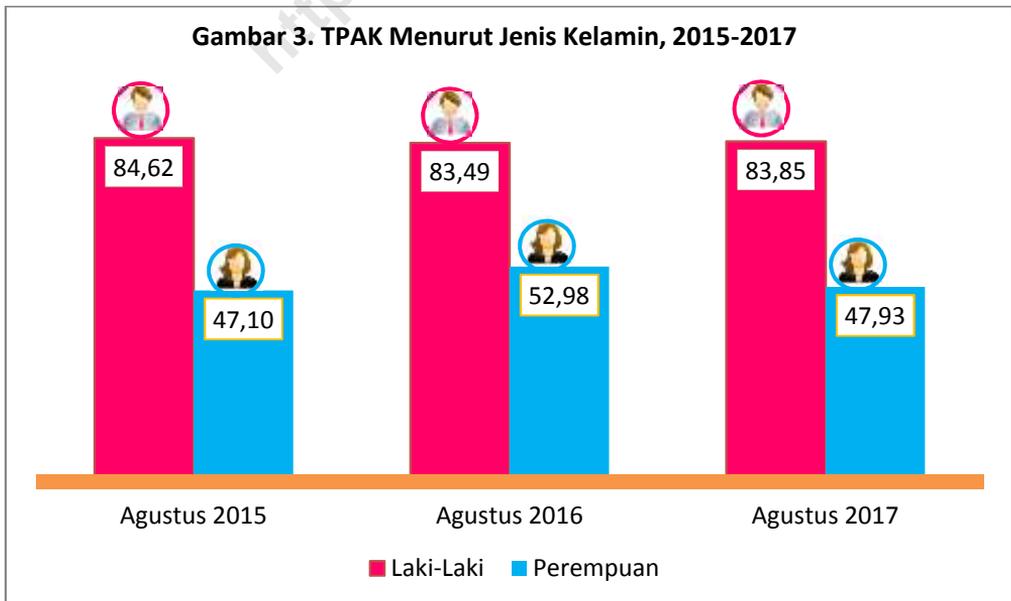
“Jumlah angkatan kerja dan TPAK Agustus 2017 cenderung menurun dibanding Agustus 2016”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada keadaan Agustus 2015 hingga Agustus 2017, dimana TPAK laki-laki besarnya hampir dua kali TPAK perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2017 TPAK laki-laki mencapai 83,85 persen sementara TPAK perempuan hanya 47,93 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 83 orang, sementara itu, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya terdapat sekitar 47 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2017, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen dibandingkan dengan tahun 2016, namun hal sebaliknya justru terjadi pada TPAK perempuan, dimana pada Agustus 2017 justru lebih rendah dari tahun 2016 yang mencapai 52,98 persen.

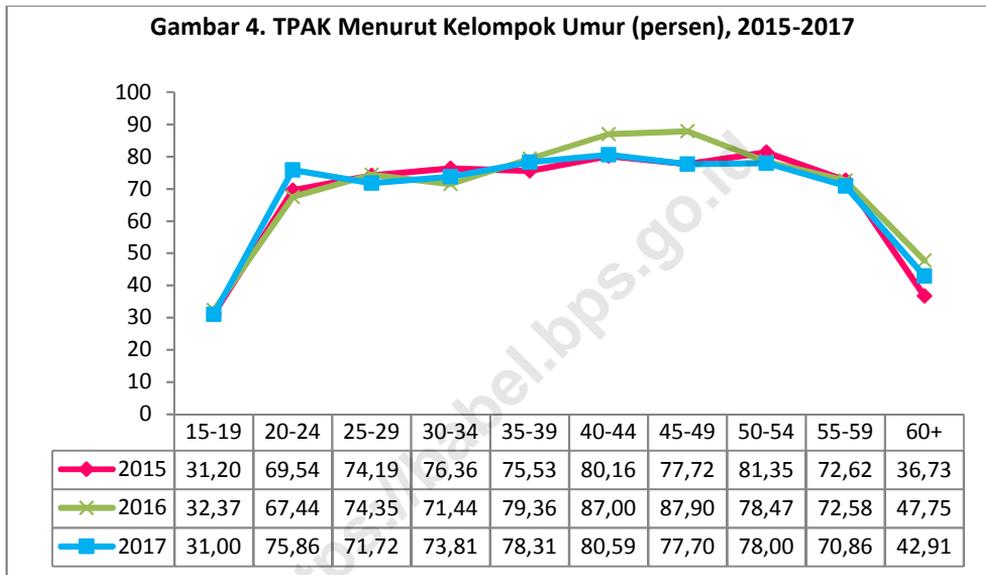
“TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dari TPAK perempuan”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017



Secara total TPAK Agustus 2017 lebih rendah 2,21 poin persen dibandingkan TPAK Agustus 2016 dan lebih tinggi 0,01 poin persen dibanding TPAK Agustus 2015. Apabila dibandingkan TPAK per kelompok umur, terjadi hal yang sama pada hampir semua kelompok umur dimana TPAK 2017 lebih rendah daripada TPAK 2016.



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

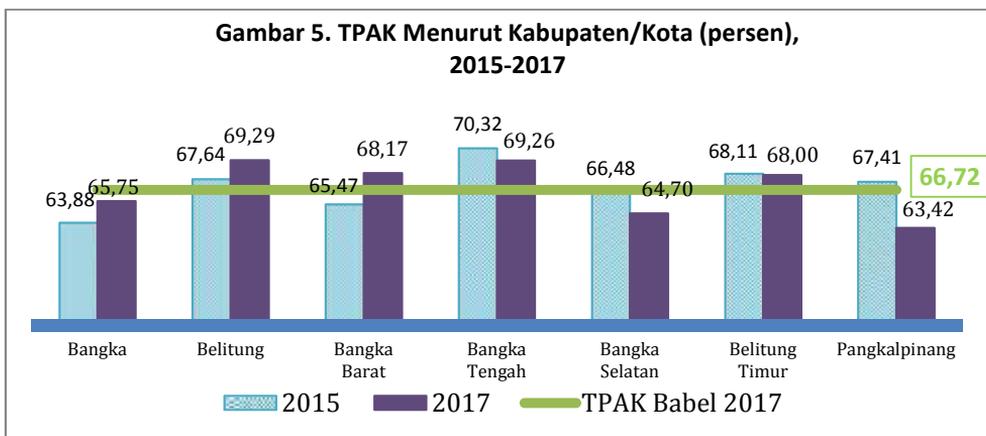
“Pola TPAK menurut kelompok umur terlihat membentuk huruf U terbalik yang mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya umur partisipasi pada pasar angkatan kerja makin meningkat hingga pada titik tertentu akan kembali menurun sejalan dengan menurunnya produktifitas”

Angka partisipasi penduduk usia 15-19 tahun pada pasar tenaga kerja cenderung rendah karena masih banyak yang bersekolah. TPAK melonjak naik pada kelompok umur 20-24 tahun, kemudian mencapai puncaknya pada usia 45-49 tahun dan perlahan turun pada umur berikutnya dimana salah satu penyebabnya adalah karena alasan pensiun.

TPAK menurut kabupaten/kota berdasarkan Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Belitung (69,29 persen), Kabupaten Bangka Tengah (69,26 persen), dan Kabupaten Belitung Timur (68,00 persen). Angka TPAK ketiga kabupaten tersebut lebih tinggi dari angka TPAK provinsi yang sebesar 66,72 persen. Sedangkan pada Sakernas Agustus 2015, tiga kabupaten/kota yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Bangka Tengah dengan TPAK sebesar 70,32 persen, Kabupaten Belitung Timur dengan TPAK sebesar 68,11 persen dan Kabupaten Belitung dengan TPAK sebesar 67,64 persen.

"Kabupaten Belitung memiliki TPAK tertinggi di tahun 2017"

Kabupaten/kota dengan TPAK terendah berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 adalah Kota Pangkalpinang (63,42 persen) dan Kabupaten Bangka Selatan (64,70 persen). Sedangkan pada Sakernas Agustus 2015, TPAK terendah diduduki oleh Kabupaten Bangka (63,88 persen) dan Kabupaten Bangka Barat (65,47 persen).



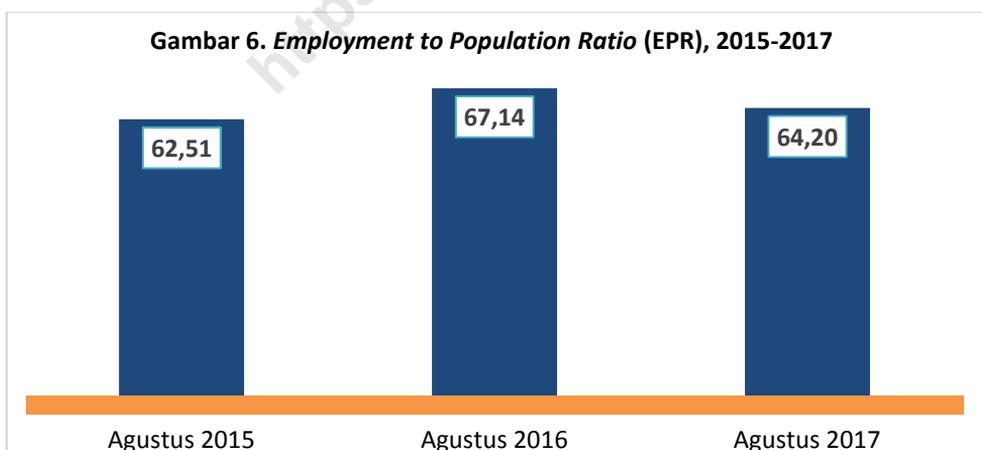
Keterangan : Tahun 2016 tidak mencakup estimasi level kabupaten/kota
 Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017



KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

Salah satu indikator penting dalam pasar tenaga kerja adalah EPR. Dengan EPR kita dapat mengetahui secara umum proporsi antara penduduk yang bekerja dari keseluruhan penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas). Seperti yang disajikan pada Gambar 6, angka EPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2017 adalah sebesar 64,20. Angka tersebut memperlihatkan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 64 orang yang bekerja. EPR ini mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2016, yaitu turun sebesar 2,94 poin.

“Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2017 adalah sebesar 64,20”



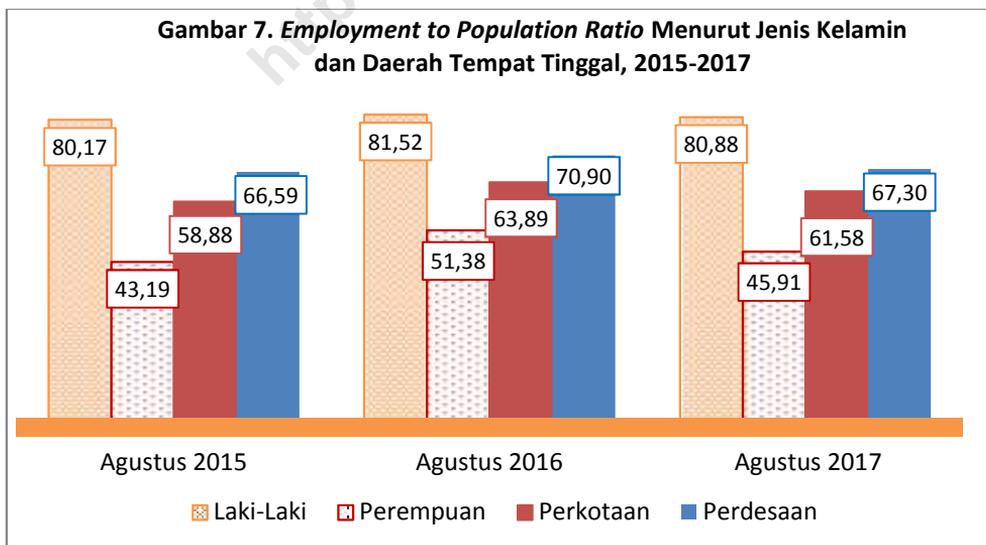
Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Pada periode Agustus 2015–2017, EPR laki-laki lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2017, EPR laki-

laki pada periode ini adalah sebesar 80,88 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 45,91.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, pada Agustus 2017 EPR daerah perkotaan (61,58) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (67,30). Begitu pula untuk periode Agustus 2015 hingga Agustus 2016, yakni nilai EPR wilayah perkotaan selalu lebih rendah dibanding EPR wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perdesaan lebih mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tanpa melihat jenis pekerjaan dan sektor mana yang mampu menyerap tenaga kerja dominan. Tingginya angka seraoan tenaga kerja di wilayah perdesaan merupakan hal yang umum terjadi, hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan tidak memerlukan pendidikan dan *skill*/kemampuan yang terlalu tinggi.

“EPR laki-laki lebih tinggi dari EPR perempuan dan EPR perdesaan lebih tinggi dari EPR perkotaan”



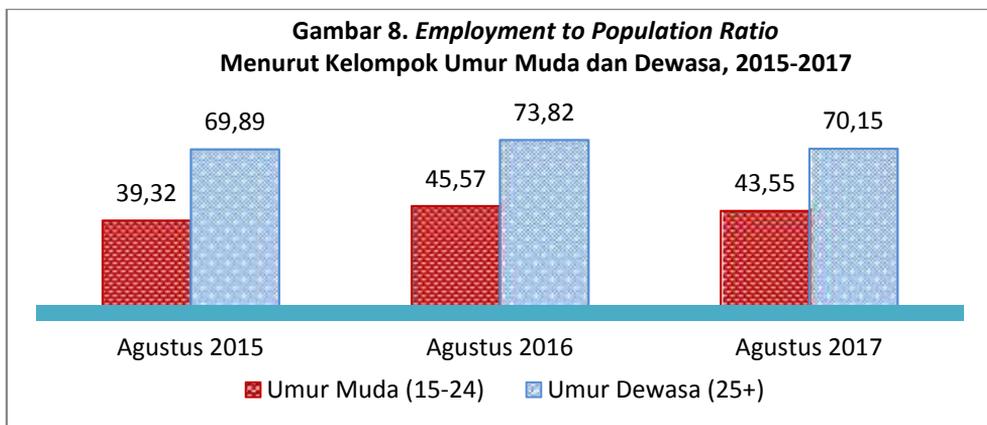
Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017



EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun) selalu lebih rendah dari penduduk kelompok umur dewasa selama kurun waktu Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2017. EPR penduduk kelompok umur muda lebih rendah sekitar 30 poin dari penduduk kelompok umur dewasa. EPR penduduk kelompok umur muda pada periode Agustus 2016–Agustus 2017 turun sebesar 2,02 poin yaitu dari 45,57 menjadi 43,55. Kondisi yang sama juga terjadi pada kelompok umur dewasa dimana EPR pada periode Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 turun sebesar 3,67 poin. Sementara itu, untuk periode Agustus 2015 ke Agustus 2017 EPR pada kelompok umur dewasa mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin.

Terlepas dari besarnya, angka EPR pada kelompok umur muda memang seharusnya lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok umur dewasa. Hal ini mempertimbangkan bahwa pada kelompok umur muda seharusnya masih berada pada bangku sekolah, setidaknya hingga pendidikan menengah atas yaitu umur 19 atau 20 tahun.

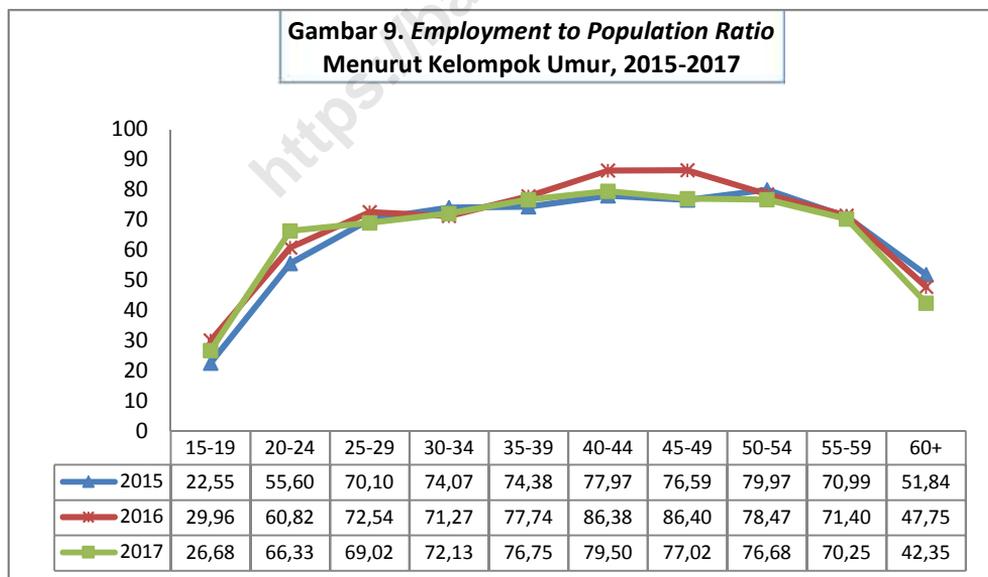
“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Gambar 9 menunjukkan pola EPR berdasarkan kelompok umur yang memiliki pola serupa dengan pola TPAK pada Gambar 4. Hal ini menunjukkan adanya dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja menurut kelompok umur. Apabila dibandingkan per kelompok umur, pada Gambar 9 terlihat bahwa puncak EPR untuk keadaan Agustus 2017 berada pada kelompok umur 40–44 tahun dengan EPR 79,50. Grafik EPR periode Agustus 2016 dan Agustus 2017 terlihat tidak terlalu berhimpitan pada semua kelompok umur, namun terlihat pola yang unik dimana pada Agustus 2017 EPR terlihat lebih rendah daripada periode sebelumnya, yaitu periode Agustus 2016.

“EPR tertinggi tahun 2017 terdapat pada kelompok umur 40-44 tahun”



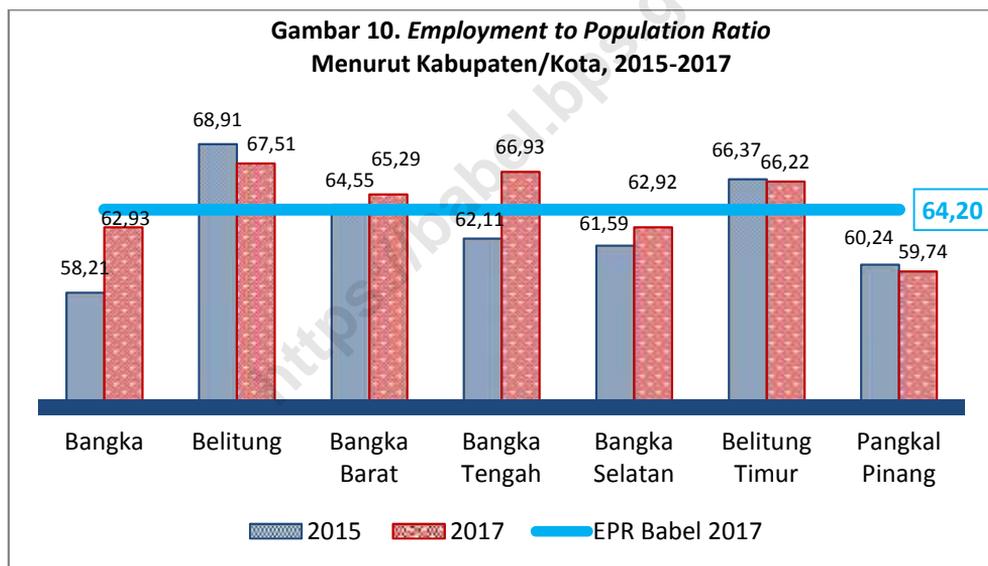
Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Gambar 10 menunjukkan EPR menurut kabupaten/kota pada periode Agustus 2015 dan Agustus 2017. Pada kondisi Agustus 2015, EPR



tertinggi diduduki oleh Kabupaten Belitung (68,91) dan Belitung Timur (66,37), sedangkan EPR terendah berada di Kota Pangkalpinang (60,24) dan Kabupaten Bangka (58,21). Sementara itu, pada kondisi Agustus 2017, EPR tertinggi masih diduduki oleh Kabupaten Belitung (67,51), sedangkan posisi kedua yaitu Kabupaten Bangka Tengah (66,93). EPR terendah juga masih di tempati oleh Kota Pangkalpinang (59,74) dan posisi kedua di Kabupaten Bangka Selatan (62,92).

“EPR tertinggi didominasi oleh kabupaten di pulau Belitung”



Keterangan : Tahun 2016 tidak mencakup estimasi level kabupaten/kota

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA)

Distribusi penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2017 tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada

periode sebelumnya. Tabel 1 menunjukkan persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (45,36 persen), diikuti penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai (45,06 persen) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (9,58 persen).

“Mayoritas pekerja di Kepulauan Bangka Belitung berstatus berusaha”

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015-2017

Status Pekerjaan Utama	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	41,60	38,42	45,06
Berusaha	45,02	47,01	45,36
<i>Pengusaha (Berusaha dibantu buruh tetap)</i>	<i>4,27</i>	<i>6,00</i>	<i>6,56</i>
<i>Berusaha sendiri + Berusaha dibantu buruh tidak tetap</i>	<i>33,34</i>	<i>34,90</i>	<i>32,74</i>
<i>Pekerja bebas</i>	<i>7,40</i>	<i>6,10</i>	<i>6,06</i>
Pekerja keluarga	13,38	14,57	9,58

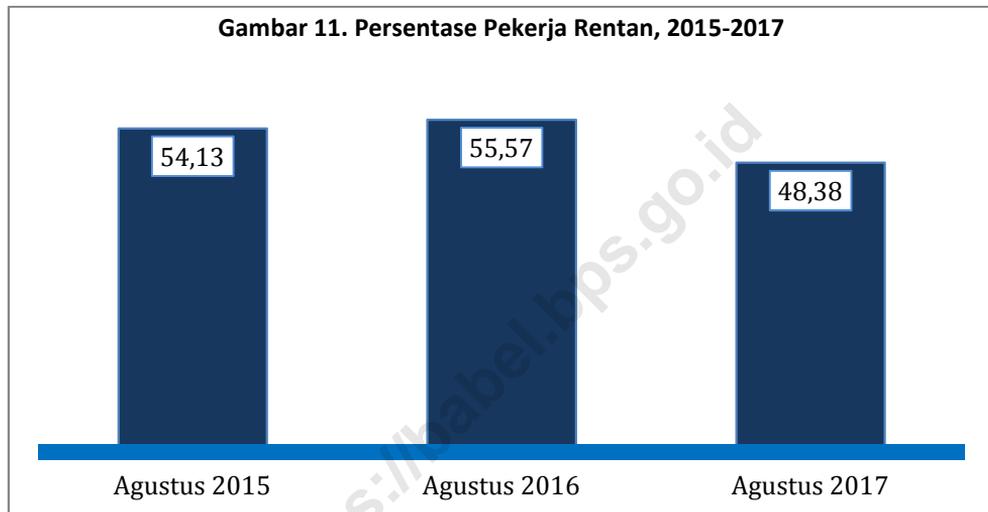
Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Periode Agustus 2016–Agustus 2017 penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 1,65 poin persen. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga, yaitu mengalami penurunan sebesar 4,99 poin persen. Sedangkan untuk pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 6,64 poin persen pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2015, pada tahun 2017 persentase penduduk



bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin persen. Sedangkan persentase pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 3,80 poin persen dan penduduk bekerja yang berstatus pegawai/buruh/karyawan mengalami penurunan sebesar 3,46 poin persen.

“Terjadi penurunan persentase pekerja rentan”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Pekerja rentan (*vulnerable employment*) adalah para pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Pada Agustus 2017, di Kepulauan Bangka Belitung terdapat pekerja rentan sebesar 48,38 persen, artinya dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 48 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 persentase pekerja rentan mengalami penurunan sebesar 7,19 poin persen, yaitu dari 55,57 persen pada tahun 2016 menjadi 48,38 persen pada tahun 2017.

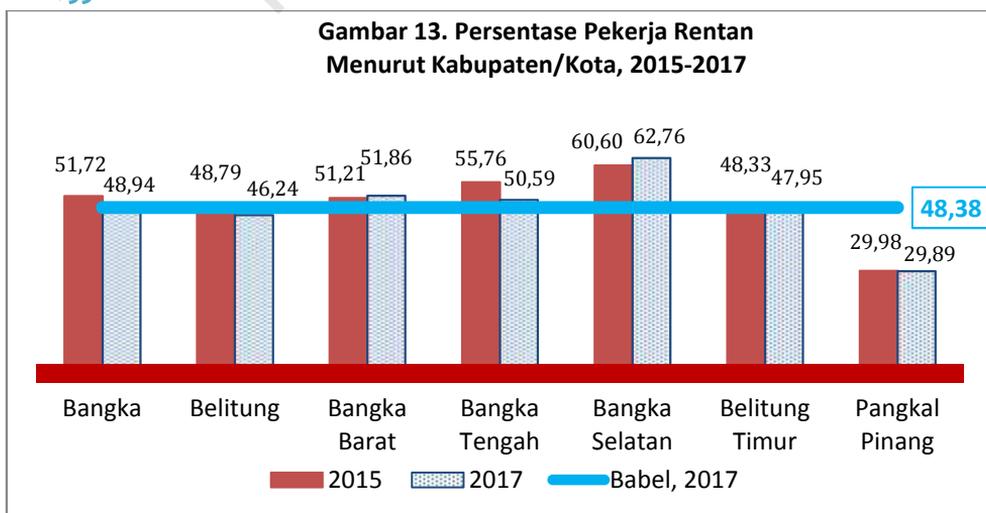
“Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, pada pekerja perempuan terdapat proporsi pekerja rentan sebesar 52,06 persen, yang berarti lebih dari setengah pekerja perempuan masuk kategori pekerja rentan. Sementara pada laki-laki, proporsi pekerja rentan sebesar 46,47 persen.

“Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten dengan persentase pekerja rentan tertinggi”



Keterangan: Tahun 2016 tidak mencakup estimasi level kabupaten/kota

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Kabupaten/kota dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2017 adalah Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebesar 62,76 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada periode Agustus 2015 dimana persentase pekerja rentan tertinggi juga ada di Kabupaten Bangka Selatan dengan persentase sebesar 60,60 persen. Sebaliknya kabupaten/kota dengan persentase pekerja rentan terendah pada periode Agustus 2015 dan Agustus 2017 adalah Kota Pangkalpinang dengan persentase masing-masing periode sebesar 29,98 persen dan 29,89 persen.

KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Agustus 2017 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan sebelumnya, yaitu didominasi oleh sektor jasa dengan persentase penduduk bekerja pada sektor jasa sebesar 41,86 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 32,65 persen, dan sektor manufaktur sebesar 23,35 persen.

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa”

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyumbang terbesar di sektor jasa adalah sektor perdagangan (19,97 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan (17,57 persen). Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor pertambangan (11,36 persen) dan sektor industri (6,34 persen).

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Pertanian	36,63	32,13	32,65
Manufaktur	23,12	23,61	23,35
Pertambangan	12,24	11,48	11,36
Industri	5,75	8,02	6,34
Listrik, Gas dan Air	0,52	0,91	0,37
Bangunan	4,61	3,20	5,28
Jasa-jasa	40,24	44,26	41,86
Perdagangan	17,55	21,69	19,93
Transportasi	6,00	2,88	2,59
Keuangan	1,25	1,99	1,76
Jasa Kemasyarakatan	15,44	17,70	17,57

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Jika dilihat antara periode Agustus 2015 dan Agustus 2017, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 3,98 poin persen sedangkan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan sebesar 1,62 poin persen. Sementara itu sektor manufaktur cenderung stabil di angka 23 persen.

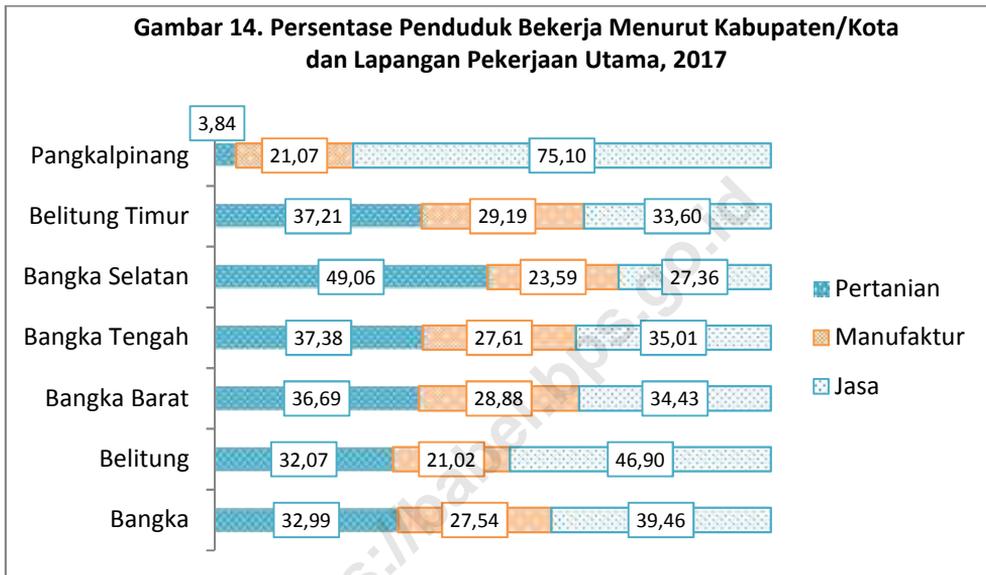
Jika dibandingkan pada periode Sakernas Agustus 2016–Agustus 2017, sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,52 poin persen. Sementara sektor manufaktur dan jasa mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,26 poin persen dan 2,40 poin persen.

“Pada Agustus 2017 kabupaten/kota dengan persentase tertinggi yang penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Kabupaten Bangka Selatan”

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2017 menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian adalah Kabupaten Bangka Selatan



(49,06 persen). Sementara itu, kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Kabupaten Belitung Timur (29,19 persen) dan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa adalah Kota Pangkalpinang (75,10 persen).



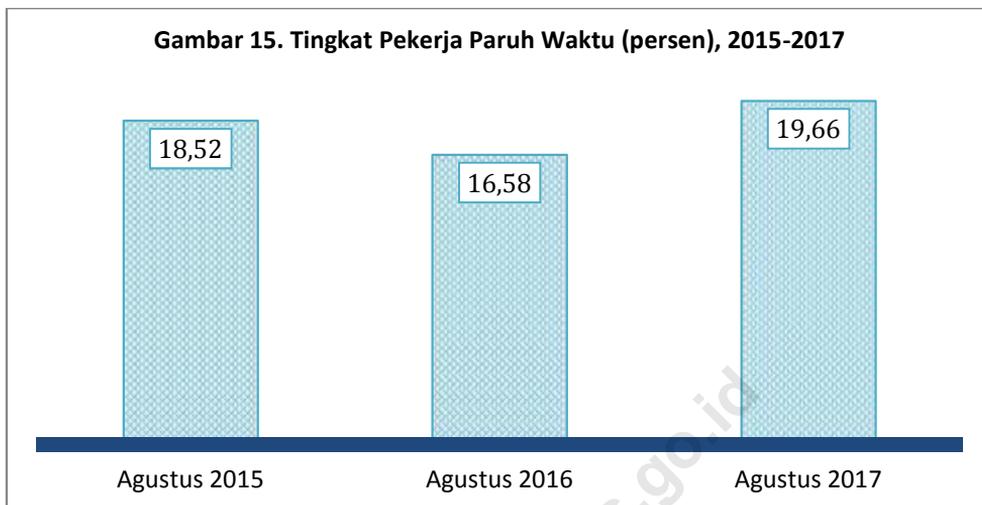
Sumber: Sakernas Agustus 2017

KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari full time, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.



“Persentase pekerja paruh waktu kembali meningkat di tahun 2017”

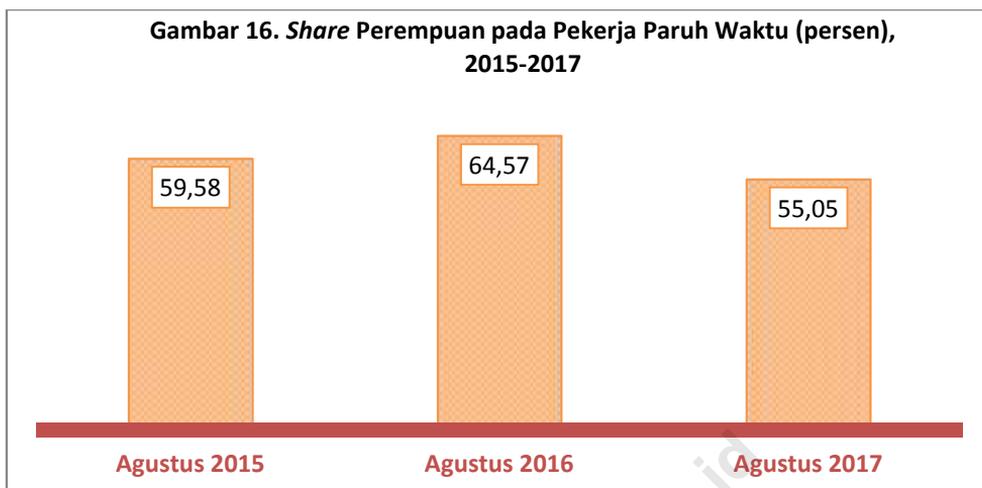


Sumber: Sakernas Agustus 2017

Hasil Sakernas Agustus 2017, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 19,66 persen. Ini berarti bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu secara sukarela. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan dibanding kondisi Agustus 2016 dan 2015. Padahal pada periode Agustus 2016 sempat menurun hingga sebesar 16,58 persen dari Agustus 2015 yang sebesar 18,52 persen. Kenaikan angka pekerja rentan pada Agustus 2017 ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah karena hal ini mengindikasikan adanya potensi pekerja yang akan menjadi pengangguran karena mereka rentan berganti pekerjaan.

“Share perempuan pada pekerja paruh waktu mengalami penurunan”





Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

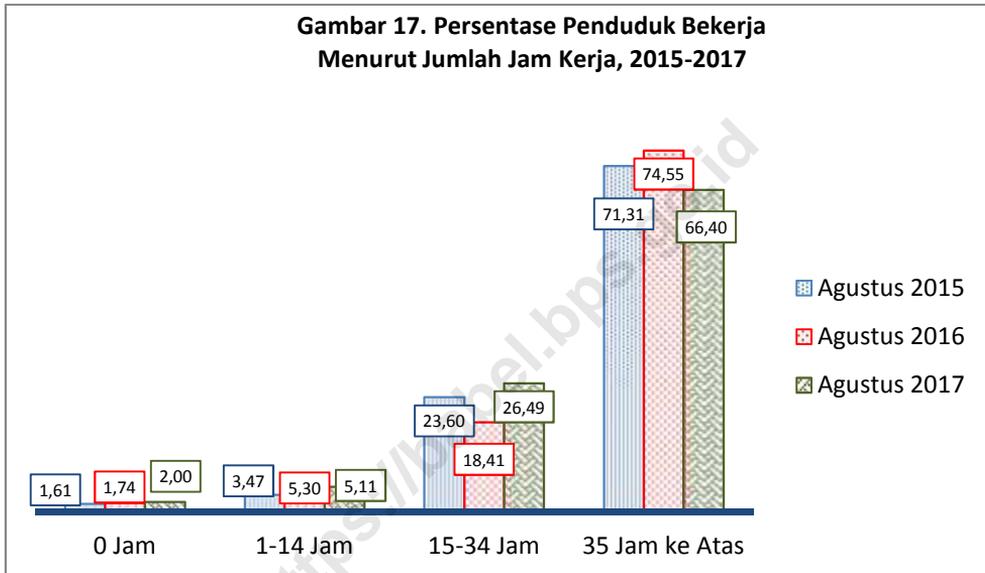
Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 sebesar 55,05 persen, yang artinya bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 55 orang di antaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu kondisi Agustus 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan periode Agustus 2015 yaitu sebesar 59,58 persen, meskipun pada Agustus 2016 sempat naik menjadi 64,57 persen.

KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja di atas 35 jam per minggu mencapai sekitar dua per tiga (66,40 persen) dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 33,60 persen, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2016 (18,41 persen) dan Agustus 2015

(23,60 persen) dengan peningkatan masing-masing sebesar 8,08 poin persen dan 2,89 poin persen.

“Mayoritas penduduk yang bekerja di Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah jam kerja di atas 35 jam per minggu”



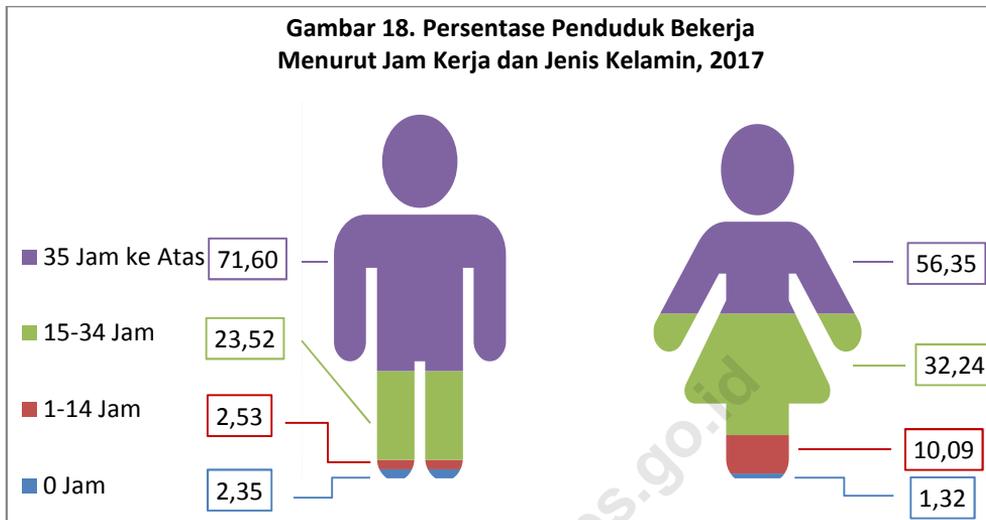
Sumber: Sakernas Agustus 2017

Dengan persentase penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang cukup tinggi, yaitu sebesar 66,40 persen, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan agar jaminan bekerja di atas 35 jam selama seminggu dapat meningkat.

Gambar 18 menunjukkan persentase penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja di Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2017. Dilihat dari jenis kelamin, persentase penduduk perempuan dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 43,65 persen, sementara persentase laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 28,40 persen.



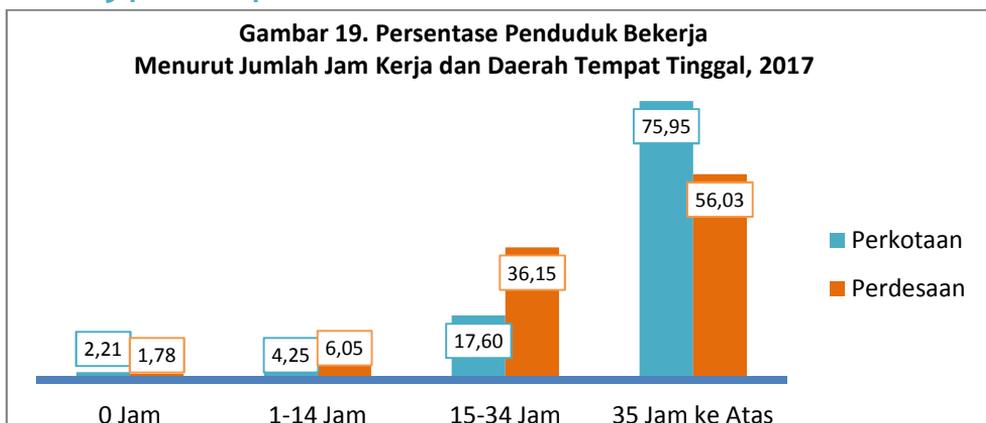
“Penduduk yang bekerja di bawah 35 jam didominasi perempuan”



Sumber: Sakernas Agustus 2017

Sedangkan penduduk yang memiliki jam kerja 35 jam ke atas per minggu lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Sakernas Agustus 2017 menunjukkan persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 35 jam per minggu sebesar 56,35 persen, sedangkan persentase penduduk laki-laki mencapai 71,60 persen.

“Penduduk perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan”



Sumber: Sakernas Agustus 2017

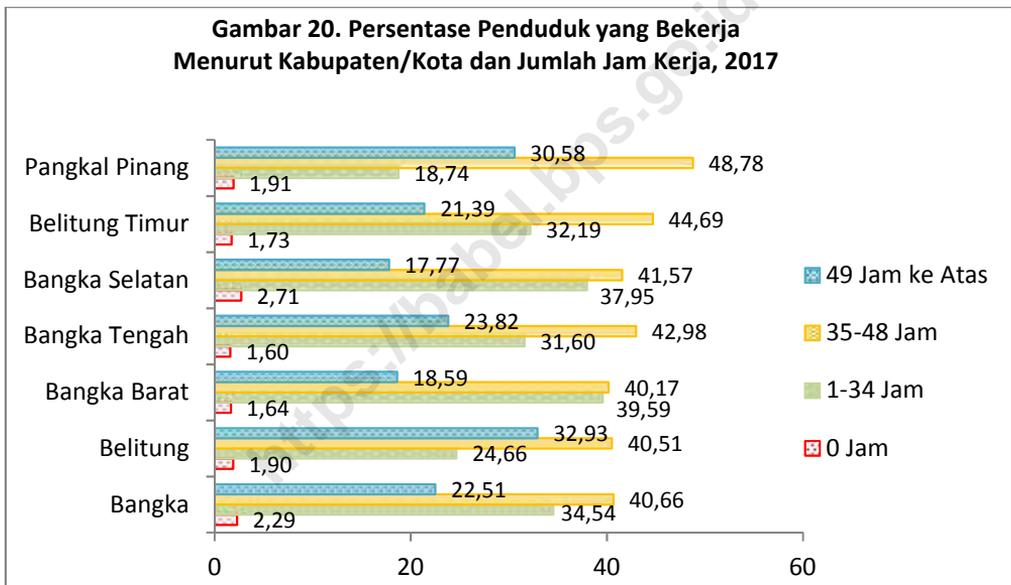
Secara umum, berdasarkan Gambar 19, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja di atas 35 jam per minggu, hanya saja di perdesaan jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 56,03 persen di wilayah perdesaan dan 75,95 persen di wilayah perkotaan. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena di wilayah perkotaan lebih banyak penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang memiliki jumlah jam kerja relatif lebih stabil. Pada umumnya pekerja yang berada pada status buruh/karyawan/pegawai berada pada sektor formal.

Dilihat pada kelompok jam kerja 15-34 jam seminggu terlihat bahwa persentase penduduk bekerja di wilayah perdesaan sebesar 36,15 persen, angka ini lebih besar dua kali lipat di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 17,60 persen. Biasanya kondisi di perdesaan yang demikian dipengaruhi oleh banyaknya ibu rumah tangga yang membantu suaminya bekerja di sektor pertanian. Sehingga selain mengurus rumah tangga, mereka juga masuk pada kategori bekerja namun dengan jam kerja yang relatif sedikit. Sementara pada kelompok jam kerja yang lain, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan cenderung memiliki persentase yang relatif sama. Salah satu yang dimungkinkan menjadi pemicunya adalah anak-anak yang membantu orang tuanya bekerja di sektor perdagangan seperti menjaga warung kelontong, konter pulsa, dll.

“Kabupaten/kota dengan persentase penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi adalah Kabupaten Bangka Selatan”



Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa dua kabupaten/kota dengan persentase penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi yaitu Kabupaten Bangka Barat (39,59 persen) dan Kabupaten Bangka Selatan (37,95 persen). Sebaliknya dua kabupaten/kota dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Kota Pangkalpinang (18,74 persen) dan Kabupaten Belitung (24,66 persen).



Sumber: Sakernas Agustus 2017

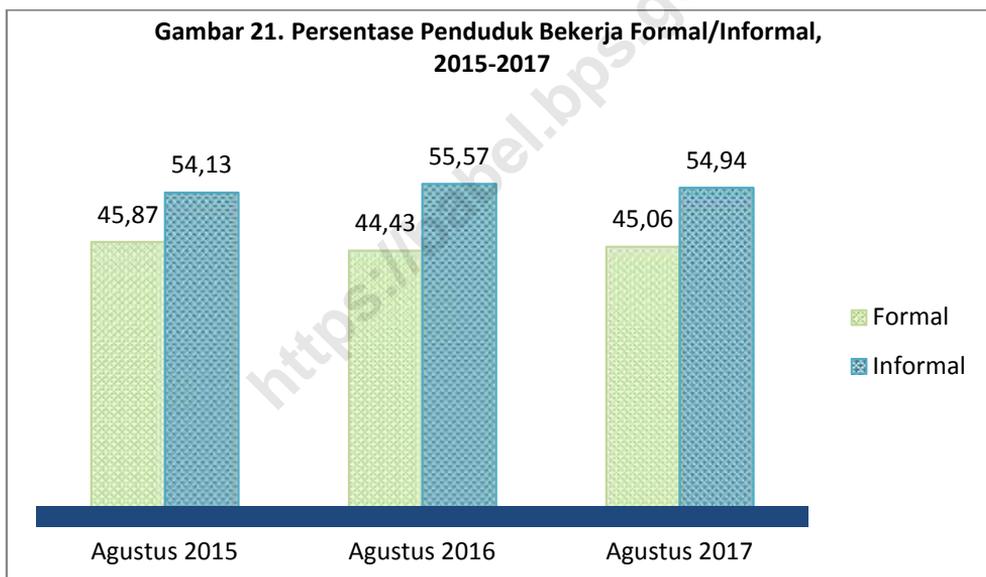
KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk

menyerap sebagian besar tenaga kerja. Sektor informal dapat didekati melalui karakteristik pekerja yakni status pekerjaan utama.

Penduduk yang dianggap sebagai pekerja di sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Selebihnya, status pekerjaan yang lainnya akan dimasukkan ke dalam sektor formal.

“Mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal yaitu 54,94 persen”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2017 tidak terjadi perubahan pola penduduk bekerja dimana sektor informal ternyata masih mendominasi di kisaran 54-55 persen. Pada tahun 2015 persentase pekerja informal mendominasi sebesar 54,13 persen sedangkan pekerja formal sebesar 45,87 persen. Dibandingkan kondisi 2015, pada tahun 2016 terjadi kenaikan persentase pekerja di sektor informal sebesar 1,44 poin persen,



yaitu dari 54,13 persen pada tahun 2015 menjadi 55,57 persen pada 2016. Namun pada tahun 2017 persentase pekerja pada sektor ini mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persen yaitu sebesar 54,94 persen.

<https://babel.bps.go.id>



BAB 4

INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. PENGANGGURAN

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,78 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 seperti yang tampak pada Tabel 3, TPT Bangka Belitung sebesar 3.78 persen. Ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Bangka Belitung, terdapat sebanyak 3 sampai 4 orang yang termasuk kategori pengangguran. TPT pada Agustus 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin persen bila dibandingkan dengan Agustus 2016 (2,60 persen) dan mengalami penurunan sebesar 2,51 poin persen.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015-2017

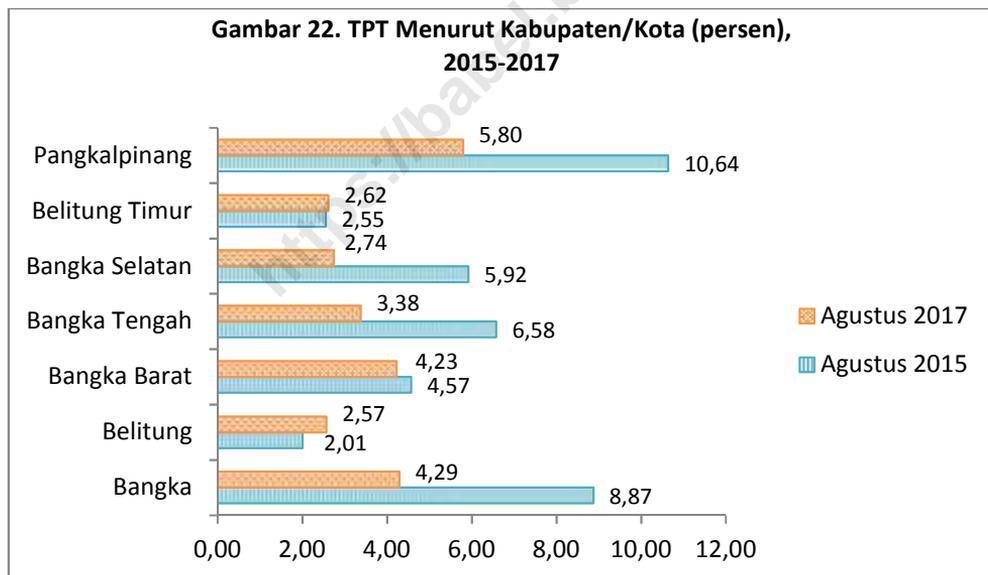
Klasifikasi	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Total	6,29	2,60	3,78
Laki-Laki	5,27	2,36	3,55
Perempuan	8,31	3,01	4,21
Perkotaan	9,01	2,40	5,07
Perdesaan	3,43	2,81	2,33

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT pada perempuan (4,21 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (3,55 persen). Tren ini masih mengikuti pola pada periode sebelumnya yakni tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, dengan nilai TPT yang sudah rendah perbedaan ini tidak terlalu mengkhawatirkan.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada tahun 2017 di wilayah perkotaan cenderung memiliki TPT lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan, yakni masing-masing sebesar 5,07 persen untuk wilayah perkotaan dan 2,33 persen untuk daerah perdesaan. Pola yang serupa juga terjadi pada tahun 2015 dimana TPT perkotaan (9,01 persen) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (3,43). Namun pada tahun 2016, terdapat pola yang berbeda dengan tahun 2015 dan 2017, dimana TPT perkotaan (2,40 persen) justru lebih rendah daripada perdesaan (2,81 persen).

“TPT tertinggi ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka”



Keterangan : Tahun 2016 tidak mencakup estimasi level kabupaten/kota

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Berdasarkan Gambar 22, hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa TPT tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang (5,80 persen) dan Kabupaten Bangka (4,29 persen). Pola yang sama juga terjadi pada periode



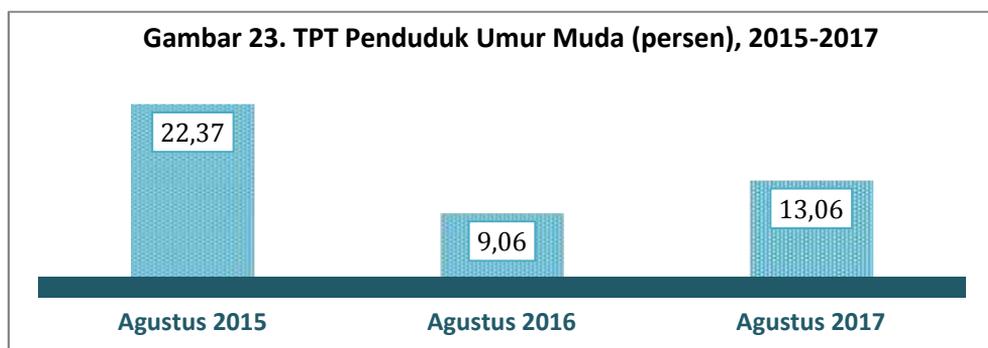
Agustus 2015 dimana TPT tertinggi masih terdapat di dua kabupaten tersebut. Sedangkan untuk TPT terendah baik pada periode Agustus 2015 maupun 2017, terdapat di kabupaten di Kabupaten Belitung (2,01 persen) dan Kabupaten Belitung Timur (2,55 persen).

KILM 9. PENGANGGUR PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan salah satu permasalahan penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

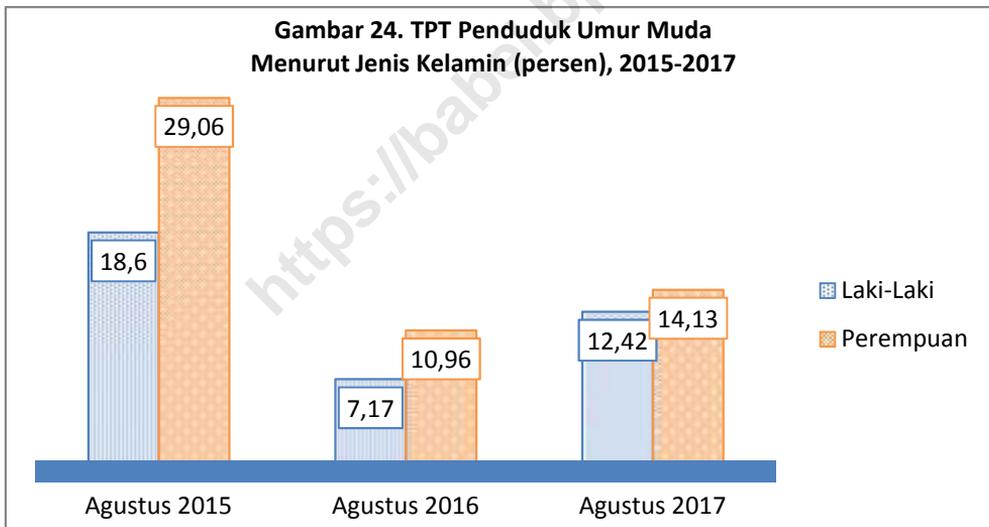
- Tingkat pengangguran kaum muda;
- Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- Share* pengangguran kaum muda terhadap total pengangguran;
- Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

“TPT kelompok umur muda masih cukup tinggi”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 13,06 persen, ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang berumur 15–24 tahun, terdapat sekitar 9 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 4,00 poin persen bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2016, yaitu sebesar 9,06 persen. Selama periode 2015-2017 terjadi fluktuasi TPT penduduk umur muda yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 TPT umur muda sebesar 22,37 persen namun tahun 2016 turun sebesar 13,31 poin persen yaitu menjadi 9,06 persen. Kemudian sedikit meningkat pada tahun 2017 yaitu menjadi 13,06 persen.



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki”

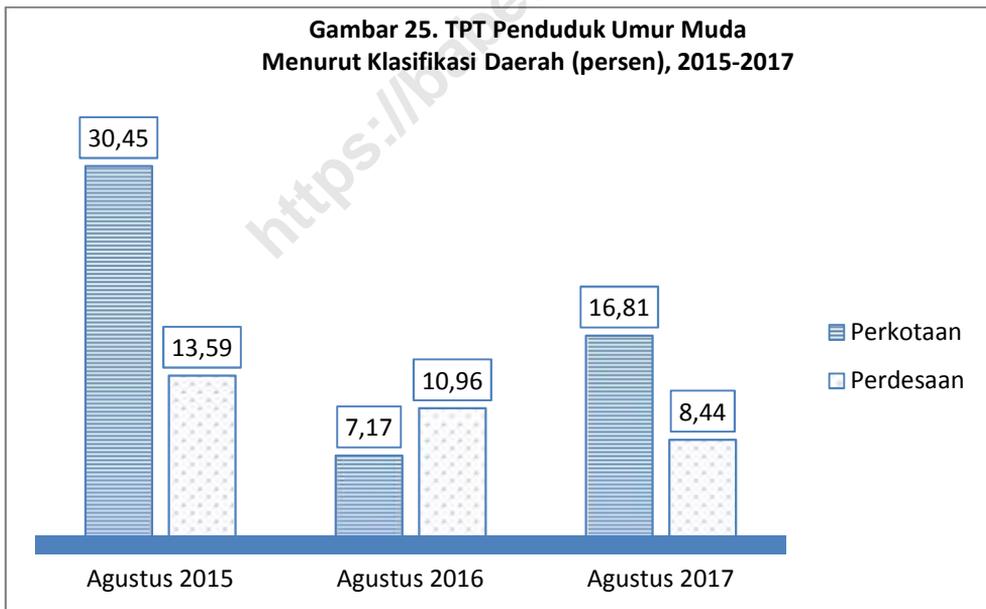
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 2017, TPT penduduk umur muda pada penduduk perempuan cenderung lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Ini



menunjukkan bahwa pada penduduk perempuan kelompok umur 15–24 tahun banyak yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama.

Dibandingkan kondisi tahun 2016, pada tahun 2017 terjadi kenaikan TPT baik laki-laki maupun perempuan. TPT penduduk laki-laki meningkat sebesar 5,25 poin persen yaitu dari 10,96 persen menjadi 14,13 persen. Sedangkan TPT penduduk perempuan meningkat sebesar 3,17 poin persen, yaitu sebesar 7,17 persen pada tahun 2016 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding perdesaan, kecuali pada tahun 2016”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Berdasarkan Gambar 25, bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pola TPT umur muda daerah di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan pada kondisi Agustus 2015 dan 2017.

Sedangkan pada Agustus 2016 menunjukkan pola yang berbeda dimana TPT perkotaan lebih rendah daripada TPT di daerah perdesaan.

Pada Agustus 2015, TPT umur muda daerah perkotaan mencapai 30,45 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 13,59 persen. Ini bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 30 orang yang menganggur di daerah perkotaan, sementara untuk daerah perdesaan terdapat sekitar 13 orang yang menganggur.

Angka tersebut merupakan angka TPT tertinggi selama periode 2015-2017. Tingginya TPT di wilayah perkotaan merupakan hal yang dapat dimaklumi. Hal ini sejalan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan, dimana masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah perkotaan. Selain itu, secara umum lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan biasanya membutuhkan *skill* serta tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

“TPT kelompok umur muda hampir 7 kali lipat lebih tinggi daripada TPT dewasa”

Pada Agustus 2017, rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa sebesar 6,86 dapat diartikan bahwa TPT umur muda sekitar 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan TPT dewasa. Kondisi serupa juga terjadi pada dua periode sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016, dimana TPT umur muda selalu lebih tinggi daripada TPT dewasa. Kondisi ini sangat wajar terjadi karena mayoritas penduduk umur muda masih bersekolah atau menunggu mendapatkan pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2015, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa tahun 2017 mengalami



penurunan sebesar 1,47 poin, namun jika dibandingkan dengan Agustus 2016 rasio TPT umur muda naik sebesar 4,61 poin persen.

Tabel 4. Indikator Penganggur Umur Muda, 2015-2017

Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	8,33	2,25	6,86
Laki-Laki	7,72	5,27	6,69
Perempuan	8,96	10,06	7,09
Perkotaan	7,41	5,01	6,54
Perdesaan	11,38	10,15	7,19

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

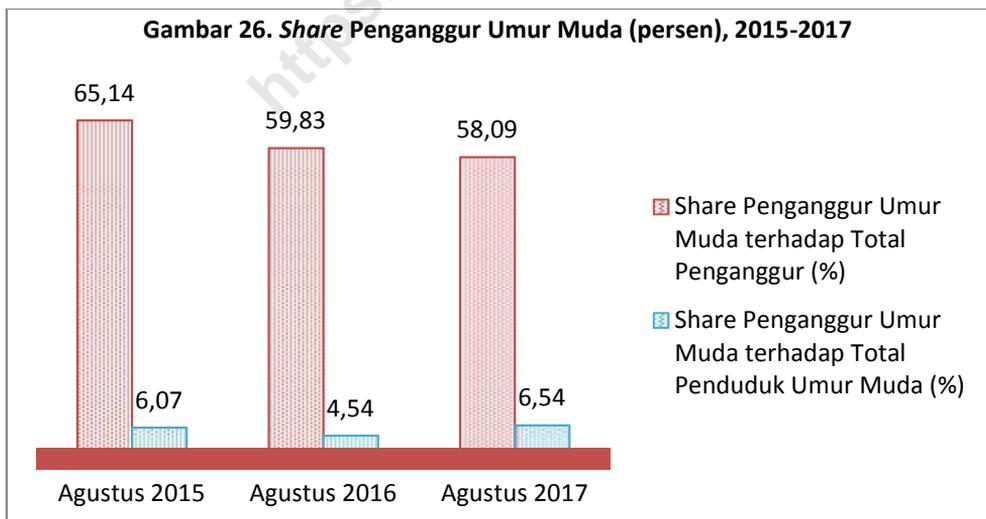
Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada Agustus 2017, rasio TPT umur muda terhadap TPT pada perempuan (7,09) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (6,69). Walaupun terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada periode 2015-2017, rasio TPT penduduk perempuan secara konsisten menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan rasio TPT penduduk laki-laki pada periode yang sama. Kondisi ini juga masih wajar terjadi, hal ini dikarenakan secara umum peran laki-laki sebagai pencari nafkah masih sangat besar dibandingkan perempuan yang lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga.

Menurut daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan selama periode Agustus 2015-2017. Sebagai contoh, pada Agustus 2017 rasio TPT

umur muda terhadap TPT penduduk dewasa di perkotaan sebesar 6,54 sementara di perdesaan mencapai 7,19.

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017 cukup tinggi yaitu 58,09 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2017, dari 100 orang penganggur (15 tahun ke atas) terdapat sekitar 58 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Angka tersebut terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. *Share* penganggur umur muda mengalami penurunan sebesar 1,74 poin persen bila dibandingkan dengan Agustus 2016 (59,83 persen), begitu pula jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 (65,14 persen) dimana *share* umur muda mengalami penurunan sebesar 7,05 poin persen.

“Lebih dari setengah total penganggur adalah mereka yang berusia 15-24 tahun”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2017 sebesar 6,54 persen. Hal ini dapat

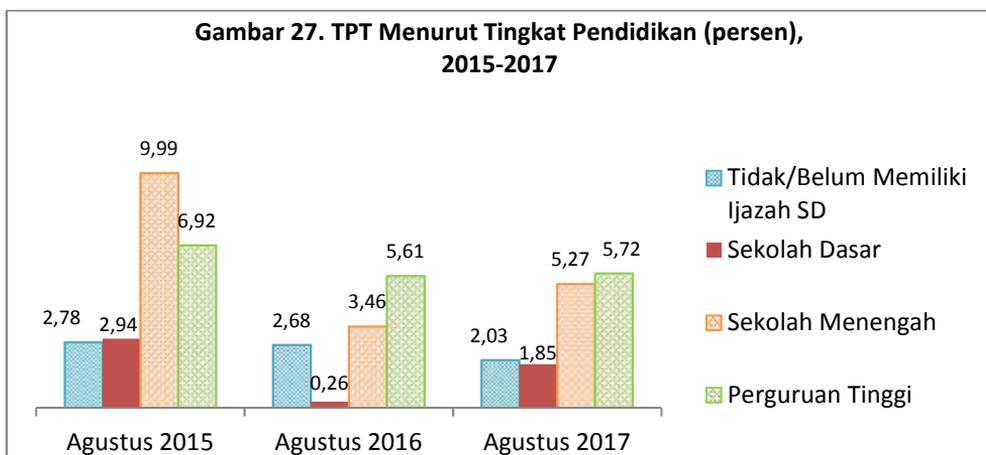


diartikan bahwa pada Agustus 2017, dari 100 penduduk umur muda (15-24 tahun) sekitar 6 sampai 7 orang diantaranya adalah penganggur. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2016 (4,54 persen) dan Agustus 2015 (6,07 persen), yaitu masing masing sebesar 2,00 poin persen dan 0,47 poin persen.

KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan perguruan tinggi (D1 ke atas) yaitu sebesar 5,72 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi, 5-6 orang di antaranya adalah pengangguran. Sebaliknya, yang terendah adalah kelompok berpendidikan SD dengan TPT sebesar 1,85 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SD, 1-2 orang di antaranya adalah

“Pengangguran didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke atas”



Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Fenomena yang umum terjadi terkait pengangguran terdidik adalah mereka yang berpendidikan tinggi biasanya cenderung untuk lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan skil dan kemampuan mereka dan jika ada pekerjaan yang tidak sesuai, mereka lebih memilih untuk tidak bekerja. Sementara bagi yang berpendidikan rendah akan selalu siap melakukan pekerjaan apapun karena biasanya pekerjaan yang ada tidak memerlukan kemampuan bekerja yang tinggi.

Secara umum selama periode Agustus 2016-2017 terjadi kenaikan TPT di semua jenjang pendidikan kecuali kategori tidak/belum bersekolah. TPT jenjang pendidikan SD (1,85 persen) mengalami kenaikan sebesar 1,59 poin persen dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 0,26 persen. Pada tingkat sekolah menengah (5,27 persen) TPT naik sebesar 1,81 poin persen yaitu sebesar 3,46 persen pada 2016, dan perguruan tinggi TPT juga mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin persen, yaitu sebesar 5,61 persen pada 2016 menjadi 5,72 persen pada 2017. Sementara TPT bagi penduduk yang tidak tamat SD atau belum bersekolah (2,03) mengalami penurunan sebesar 0,65 poin persen jika dibandingkan tahun 2016 (2,68 persen). Namun kenaikan TPT pada 2017 terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan TPT tahun 2015. Pada tahun 2015 TPT pada seluruh kelompok Pendidikan masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2016-2017.

Tabel 5 menjelaskan secara lebih rinci perubahan TPT selama kurun waktu 2015-2017. Pada tahun 2017, peningkatan TPT pada jenjang sekolah menengah merupakan kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan TPT pada jenjang pendidikan lainnya. Selain itu dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, kenaikan TPT untuk jenis kelamin laki-laki pada jenjang sekolah menengah juga merupakan kenaikan tertinggi dibandingkan jenjang



lainnya untuk kelompok penduduk laki-laki, yaitu naik sebesar 3,35 poin persen di tahun 2017. Sedangkan pada kelompok penduduk perempuan, di tahun 2017 tren TPT mengalami penurunan pada kelompok pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi yaitu masing-masing turun sebesar 0,72 persen dan 1,21 persen.

“TPT mengalami kenaikan di setiap jenjang pendidikannya, kecuali kelompok yang tidak/belum memiliki ijazah SD mengalami penurunan”

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015-2017

Tingkat Pendidikan	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Total	6,29	2,60	3,78
Tidak/Belum Memiliki Ijazah SD	2,78	2,68	2,03
Laki-Laki	3,30	3,38	3,79
Perempuan	2,51	2,18	1,40
Perkotaan	2,30	0,96	2,29
Perdesaan	3,57	5,21	1,55
Sekolah Dasar	2,94	0,26	1,85
Laki-Laki	5,54	0,68	3,13
Perempuan	1,69	0,00	1,04
Perkotaan	3,51	0,42	1,31
Perdesaan	1,73	0,00	3,11
Sekolah Menengah	9,99	3,46	5,27
Laki-Laki	11,62	2,56	5,91
Perempuan	6,96	4,77	4,05
Perkotaan	7,64	3,73	5,42
Perdesaan	15,61	2,86	4,97
Perguruan Tinggi	6,92	5,61	5,72
Laki-Laki	8,63	3,65	5,27
Perempuan	0,05	9,75	8,54
Perkotaan	4,95	3,97	3,81
Perdesaan	8,99	7,36	7,61

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

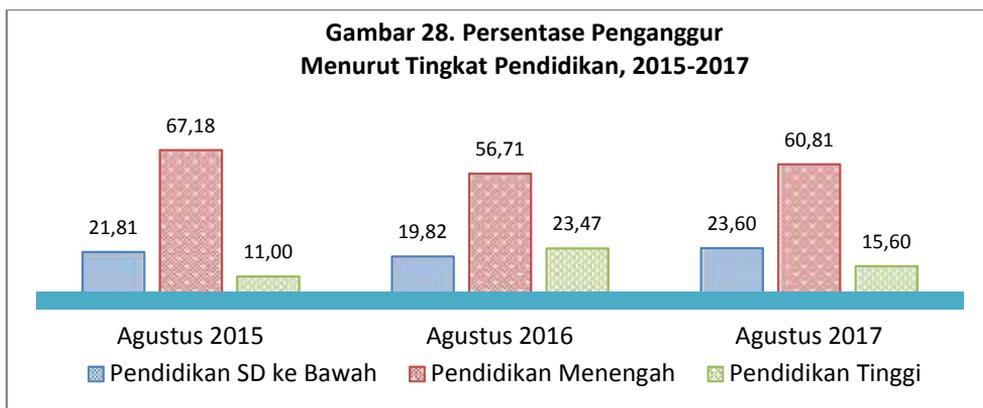
Secara umum, perubahan TPT selama periode Agustus 2016-2017 menunjukkan pola yang cukup menarik, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan nilai TPT yang semakin besar, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Kondisi serupa juga terjadi pada periode-periode sebelumnya.

TPT perempuan tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu sebesar 8,54 persen, sementara TPT terendah terdapat di jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 1,04 persen. Sedangkan untuk laki-laki, TPT tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan sekolah menengah sebesar 5,91 persen dan terendah pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 3,13 persen.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, di daerah perkotaan nilai TPT mengalami kenaikan selama periode Agustus 2016-2017 untuk semua jenjang pendidikan kecuali jenjang pendidikan perguruan tinggi. Pada jenjang perguruan tinggi, TPT daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,16 poin persen, yaitu dari 3,97 persen pada tahun 2016 menjadi 3,81 persen pada tahun 2017. Sama halnya seperti perkotaan, TPT daerah perdesaan juga cenderung mengalami kenaikan di seluruh jenjang pendidikan, kecuali pada jenjang pendidikan tidak/belum memiliki ijazah SD. Kenaikan TPT tertinggi di wilayah perdesaan ada pada jenjang pendidikan SD, yaitu naik sebesar 3,11 poin persen. Sedangkan pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan tidak/belum memiliki ijazah SD, TPT turun sebesar 3,66 poin persen.

“Pada periode Agustus 2015 sampai dengan 2017 persentase penganggur terendah terdapat pada tingkat pendidikan sekolah menengah”





Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada Agustus 2015-2017 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Gambar 28 juga memperlihatkan bahwa secara umum tingkat pengangguran terendah berada pada jenjang pendidikan tinggi.

KILM 12. SETENGAH PENGANGGURAN (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang memiliki jam kerja di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan mereka yang masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Setengah Pengangguran biasanya juga dikenal dengan istilah setengah pengangguran terpaksa.

“Penduduk di wilayah perdesaan paling rentan berstatus sebagai setengah penganggur”

Tabel 6. Indikator Setengah Pengangguran (persen), 2015-2017

Setengah Penganggur	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	7,66	6,95	5,90
Laki-Laki	7,32	7,27	5,48
Perempuan	8,32	6,40	6,71
Perkotaan	5,89	5,51	4,81
Perdesaan	9,52	8,45	7,08

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, persentase setengah penganggur mencapai 5,90 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat sekitar 6-7 orang yang masuk kategori setengah penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa persentase setengah penganggur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan sejak Agustus 2015. Persentase setengah penganggur pada keadaan Agustus 2017 mengalami penurunan sebesar 1,05 poin persen bila dibandingkan dengan Agustus 2016 (6,95 persen), atau turun sebesar 1,76 poin persen dibandingkan keadaan pada Agustus 2015 (7,66 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, persentase setengah penganggur penduduk laki-laki (5,48 persen) terus mengalami penurunan sejak Agustus 2015 (7,32 persen), namun untuk kelompok perempuan (6,71 persen) persentase setengah penganggur justru mengalami kenaikan sejak tahun lalu (6,40 persen), meskipun pada Agustus 2015 (8,32 persen) sempat mengalami penurunan. Sementara itu, berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, pada periode Agustus 2015-2017 persentase setengah penganggur selalu mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Penurunan persentase setengah pengangguran sejak tahun



2015 di daerah perkotaan sebesar 1,08 poin persen yaitu dari 5,89 persen pada tahun 2015 menjadi 4,81 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk daerah perdesaan, persentase setengah pengangguran turun sebesar 2,44 poin persen sejak tahun 2015.

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

“Tingkat ketidakaktifan mencapai 31,06 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, tingkat ketidakaktifan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 33,28 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sekitar 33-34 orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 yaitu dari 31,07 persen pada Agustus 2016 menjadi 33,28 persen pada Agustus 2017. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2015, tingkat ketidakaktifan mengalami penurunan 0,1 poin persen.

Tabel 7. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2015-2017

Tingkat Ketidakaktifan	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	33,29	31,07	33,28
Laki-Laki	15,38	16,51	16,15
Perempuan	52,90	47,02	52,07
Perkotaan	35,29	34,54	35,13
Perdesaan	31,04	27,06	31,09

Sumber: Sakernas Agustus 2015-2017

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Tabel 7 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, dari seratus orang penduduk usia kerja laki-laki, terdapat sekitar 16-17 orang yang tidak aktif dalam pasar tenaga kerja.

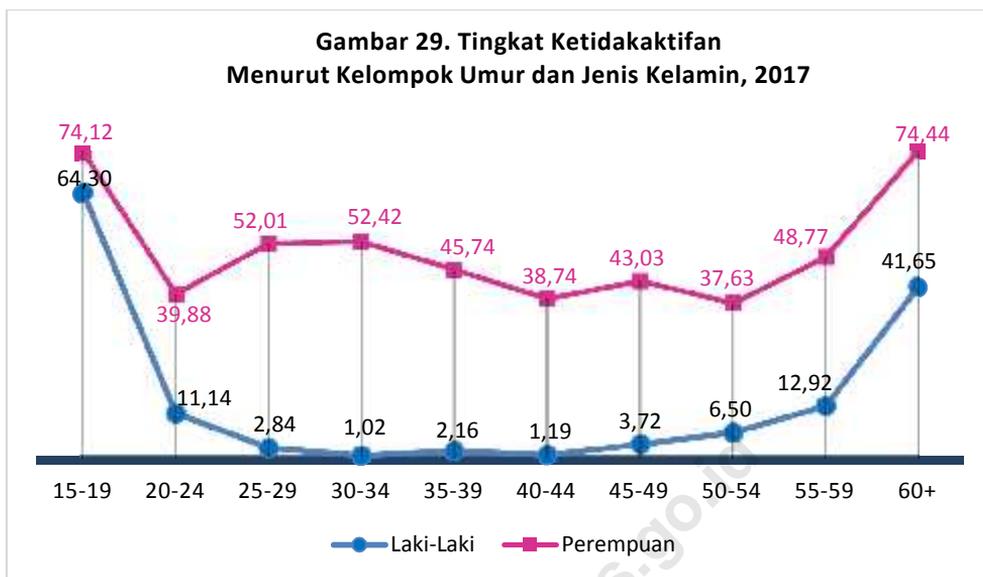
Sedangkan pada kelompok perempuan terdapat sekitar 52-53 orang dari seratus perempuan penduduk usia kerja yang tidak aktif dalam pasar tenaga kerja, atau setara dengan 3 kali lipat angka ketidakaktifan laki-laki pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016, terjadi kenaikan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 5,05 poin persen, sedangkan pada laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,36 poin persen.

Ditinjau dari daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Pada Agustus 2017 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 35,13 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin persen bila dibandingkan keadaan Agustus 2016. Sedangkan di daerah perdesaan tingkat ketidakaktifan sebesar 31,09 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,03 poin persen, yaitu dari 27,06 persen pada Agustus 2016 menjadi 31,09 persen pada Agustus 2017.

“Pola tingkat ketidakaktifan berbeda antara laki-laki dan perempuan”

Pola tingkat ketidakaktifan yang ditunjukkan pada Gambar 29 menggambarkan tingginya tingkat ketidakaktifan pada kelompok umur muda, lalu menurun pada umur produktif dan kembali meningkat pada penduduk umur tua (pola menyerupai bentuk huruf “U”).





Sumber: Sakernas Agustus 2017

Gambar 29 juga memperlihatkan adanya perbedaan pola tingkat ketidakaktifan menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan, dimana tingkat ketidakaktifan penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada periode Agustus 2017, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur 15–19 tahun mencapai 64,30 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,02 persen pada kelompok umur 30-34 tahun, dan perlahan mulai meningkat pada kelompok umur 45-49 tahun hingga kelompok umur 60+.

Pada kelompok penduduk perempuan umur 15–19 tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 74,12 persen. Perubahan tingkat ketidakaktifan mulai berfluktuatif pada kelompok umur 20-24 tahun sampai dengan 55-59. Tingkat ketidakaktifan penduduk perempuan paling rendah terdapat pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu sebesar 37,63 persen dan tertinggi pada kelompok umur 60+, yaitu sebesar 74,44 persen.

Berbeda dengan penduduk perempuan, ketidakaktifan penduduk laki-laki menunjukkan pola yang cenderung lebih stabil stabil pada kelompok umur yang sama. Tingkat ketidakaktifan penduduk laki-laki paling rendah terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu sebesar 1,02 persen dan tertinggi pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebesar 64,30 persen.

<https://babel.bps.go.id>



BAB 5

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Seperti yang kita ketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan *output*. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu daerah. Kualitas SDM salah satunya diukur dari tingkat pendidikan.

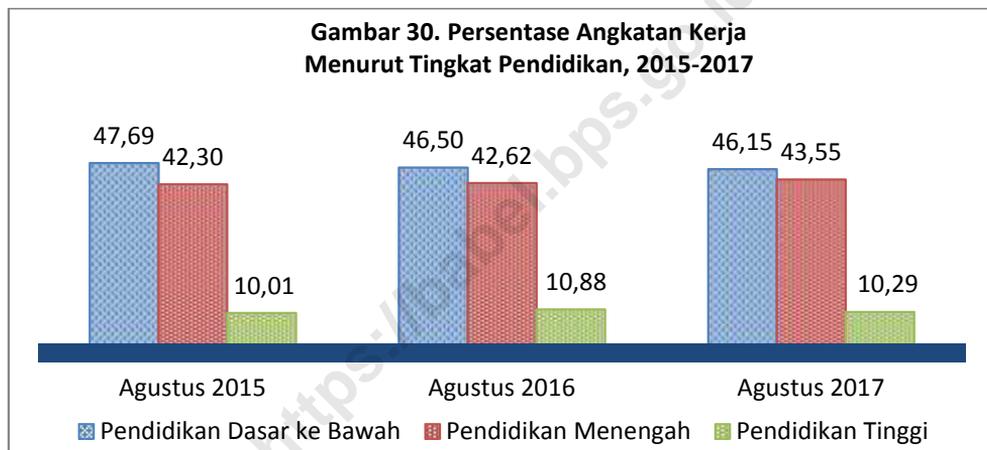
Menurut teori *Human Capital*, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Teori tersebut merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan yang tinggi dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi, maka pertumbuhan masyarakat yang berkualitas tentunya akan segera tercapai.

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan sukses dalam pasar ekonomi.

Dalam Indikator ketenagakerjaan, KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International*

Standard Classification of Education (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat melek huruf hanya berdasarkan tingkat pendidikan yang dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki.

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 46,15 persen”



Sumber: Sakernas Agustus 2017

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2017, secara umum kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan terlihat menunjukkan perubahan yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Angkatan kerja pada Agustus 2017 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 46,15 persen dan yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 43,55 persen. Secara keseluruhan, hanya sebesar 10,29 persen angkatan kerja kondisi Agustus 2017 yang masuk kategori pendidikan tinggi. Pola ini sama dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2015-2016. Rendahnya tingkat



pendidikan angkatan kerja secara tidak langsung memberikan gambaran kualitas angkatan kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya hal tersebut membutuhkan peran dan *treatment* serius dan konsisten dari para pengambil kebijakan.

<https://babel.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp : (0717) 439422, Fax : (0717) 439425
Email : bps1900@bps.go.id
Website : <http://babel.bps.go.id>

ISBN 978-602-5402-32-6

